



INSERSI NILAI-NILAI ANTIKORUPSI MELALUI PENGEMBANGAN HIDDEN CURRICULUM DI MIN 1 BANYUMAS

Widya Rahmawati Al-Nur

Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Universitas Nahdlatul Ulama
Indonesia Jakarta

Email: rahmawatiwidya@unusia.ac.id

Article Information

<http://journal.unusia.ac.id/index.php/mozaic/>

DOI:

<http://doi.org/10.47776/mozaic.v7i2.224>

Informasi Artikel

Naskah diterima:

9 Agustus 2021

Naskah direvisi:

23 Agustus 2021

Naskah disetujui:

20 Oktober 2021

Naskah dipublish:

31 Oktober 2021

Abstract

The insertion or strengthening of anti-corruption values is a step taken by the government to insert anti-corruption values into subjects in schools. The goal is none other than to create an anti-corruption generation from an early age. Anti-corruption education is a strategic study that is guarded in today's educational institutions in Indonesia in particular.

This study is a qualitative descriptive study using a phenomenological approach that describes the results of developing a hidden curriculum to strengthen or insert anti-corruption values at MIN 1 Banyumas. Data collection techniques used are observation, interviews, and documentation, and data analysis using the Milles and Huberman model. In this study, the insertion of anti-corruption values through the development of a hidden curriculum is manifested in several ways, namely, first, the insertion of anti-corruption values, namely by strengthening honesty, discipline, responsibility, and cooperation in positive ways. Second, the hidden curriculum development model used is the grass-roots model, and the three activities that support the insertion of anti-corruption attitudes are activities designed by teachers including classroom cleaning competitions, procurement of self-development books, and procurement of anti-corruption pins.

Abstrak

Keywords

Insertion, Anti Corruption Values, Development Hidden curriculum, MIN 1 Banyumas

Kata Kunci

Insersi, nilai-nilai Anti Korupsi, Pengembangan

Insersi atau penguatan nilai anti korupsi merupakan langkah yang diambil pemerintah untuk menyisipkan nilai-nilai anti korupsi dalam matapelajaran yang ada di sekolah. Tujuannya tidak lain untuk mencetak generasi anti korupsi sejak dini. Pendidikan anti korupsi menjadi kajian strategis yang dikawal dalam lembaga pendidikan hari ini di Indonesia khususnya. Studi ini merupakan studi deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan fenomenologi yang memaparkan hasil pengembangan hidden curriculum dalam rangka penguatan atau insersi nilai antikorupsi di MIN 1 Banyumas. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan

*Hidden Curriculum
Kurikulum, , MIN 1
Banyumas*

observasi, wawancara dan dokumentasi dan analisis data menggunakan model Milles and Huberman.

Dalam penelitian ini inseri nilai-nilai antikorupsi melalui pengembangan hidden kurikulum terwujud dalam beberapa hal yakni, pertama inseri nilai antikorupsi yakni dengan penguatan sikap jujur, disiplin, tanggung jawab dan bekerjasama dalam hal positif. Kedua, model pengembangan hidden kurikulum yang digunakan adalah model grass-roots, dan ketiga kegiatan yang menunjang inseri sikap antikorupsi berupa kegiatan yang dirancang oleh guru diantaranya perlombaan kebersihan kelas, pengadaan buku pengembangan diri dan pengadaan pin antikorupsi.

PENDAHULUAN

Di era yang sarat akan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini mengharuskan manusia untuk lebih bijak dalam segala hal. Jangan sampai kemudahan saat ini menimbulkan sifat dan perilaku yang tidak diharapkan. Kemudahan yang kita rasakan saat ini harapannya dapat membawa kita dalam segi positif, namun tidak memungkiri sisi negatif akan selalu ada. Hari ini pendidikan menjadi satu wadah yang diharapkan mampu menjadi filter dalam kecanggihan yang selalu bergerak maju. Nilai-nilai moral yang ditanamkan dalam aktivitas pembelajaran haruslah mampu memberikan tameng yang kuat bagi generasi bangsa ini untuk selalu bertindak bijak dan memberikan manfaat bagi sekitarnya. Pendidikan hadir sebagai wadah pengembangan skill yang produktif dan menghadirkan kreativitas dalam setiap langkahnya. Nilai humanistik harus menjadi elemen penting pendidikan yang diselenggarakan baik formal maupun informal.¹

Hari ini di Indonesia sudah menjadi hal yang wajar bahkan sering kita mendengar dan membaca berbagai kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pejabat atau oknum wakil rakyat. Bahkan tidak sedikit kerugian negara akibat kasus korupsi, terdapat 1.298 terdakwa kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2020 dengan kurang lebih negara merugi sampai 56,7 triliun.² Dengan kerugian tersebut sudah sepantasnya pemerintah melakukan langkah taktis dan tegas menyikapi kasus korupsi yang terjadi di Indonesia. Baru-baru ini yang lebih miris, kasus korupsi terjadi

¹ Rosida Tiurma Manurung, ‘Pendidikan Antikorupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter Dan Humanistik’, *Sosioteknologi*, 27, no 11 (2012), 232.

² Kompas, Diakses pada Agustus 2021 <kompas.com/read/2021/04/09/18483491/icw-sepanjang-2020-ada-1298-terdakwa-kasus-korupsi-kerugian-negara-rp-567>.

pada masa pandemi covid-19 yakni korupsi Bantuan Sosial (bansos) yang dilakukan oleh menteri sosial. Hal ini jelas tidak mengedepankan nilai humanistik seorang yang menjadi panutan rakyat. Tidak hanya menindas secara langsung melukai hati rakyat pada masa-masa sulit pandemi ini. Perhatian bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kasus korupsi yang marah terjadi di Indonesia baik di tingkat nasional maupun daerah.

Pendidikan anti korupsi menjadi salah satu strategi yang dicanangkan oleh KPK sebagai upaya kecil yang diharapkan mampu memberikan edukasi terhadap generasi penerus bangsa terhadap bahaya korupsi dan konsekuensinya. Melalui pendidikan anti korupsi diharapkan penanaman nilai-nilai anti korupsi dapat terserap dengan masif pada lini masyarakat paling muda yakni mereka yang ada di bangku sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Dalam rangka memasuki dunia pendidikan, KPK mengadakan pendidikan anti korupsi menggunakan metode inseri atau penguatan. Inseri dilakukan sebagai upaya untuk menyisipkan sikap anti korupsi dalam mata pelajaran yang mendukung. Langkah preventif ini tidak menjadi beban guru sebagai pengajar di kelas, hanya menyisipkan nilai-nilai saat menyampaikan pembelajaran di kelas.

Aktivitas inseri ini dapat dilakukan mulai dengan mengakomodasikan pada kurikulum yang digunakan di sekolah. Kurikulum sebagai sentra pembelajaran sekuang-kurangnya memuat dua kekuatan yakni *Pertama*, ketepatan memilih substansi atau lingkup pengetahuan yang akan diajarkan. Kebenaran secara substansi, penting untuk dipelajari, relevan dengan kebutuhan siswa, dan menggugah kemauan untuk mempelajari lebih mendalam secara mandiri. *Kedua*, mengelola kurikulum melalui pembelajaran yang efektif didukung dengan sistem penilaian yang mengarah pada pencapaian kompetensi dan reliabilitas pendidikan.³

Kurikulum disini tidak hanya diartikan sebagai dokumen panduan pembelajaran, namun juga ada satu kurikulum yang disebut dengan *hidden curriculum* atau kurikulum tersembunyi yang keberadaannya menjadi pendukung untuk mencapai tujuan pendidikan. Keberadaan *hidden curriculum* di sekolah dapat berupa budaya, tingkah laku atau adat kebiasaan yang terpelihara dengan baik, sehingga dapat

³ Zaulkifli Anas and dkk, *Inseri Pendidikan Antikorupsi Melalui Mata Pelajaran PPKn Untuk Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah*, 2018, H. 2.

mempengaruhi pencapaian siswa dalam pembelajaran. *Hidden curriculum* menjadi penting apabila pencapaian pendidikan menyangkut nilai moral yang harus baik. Tidak hanya cakup dalam pengetahuan, namun siswa akan menjadi generasi yang berakhlak karimah dan bertindak sesuai dengan norma yang ada. Hal ini menjadi seirama dengan inseri pendidikan antikorupsi yang dicanangkan KPK untuk diterapkan di sekolah mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi. Kurikulum ini dapat dipahami bahwa inseri pendidikan antikorupsi ini akan dilaksanakan diluar pembelajaran di dalam kelas. Penyisipan nilai-nilai anti korupsi ini akan dikemas dengan menyisipkan sikap-sikap tertentu yang akan menjadi budaya atau kebiasaan sehingga hasilnya akan mempengaruhi pencapaian pembelajaran pada ranah afektif siswa. Pada penelitian ini sikap sikap yang dimaksud adalah sikap jujur, disiplin, tanggungjawab dan kerjasama, dengan menyisipkan sikap tersebut diharapkan siswa mampu memahami pentingnya bersikap jujur, disiplin, tanggungjawab dan kerjasama dalam kehidupan sehari-hari mereka tidak hanya di sekolah namun di kehidupan mereka dimanapun mereka berada.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskripsi kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi serta menggunakan pendekatan analisis dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan. Penelitian ini dilaksanakan di MIN 1 Banyumas yang beralamat di Jalan Kali Putih No. 14 Purwokerto, Kabupaten Banyumas.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian menjadi salah satu kunci sebuah penelitian. Dengan teknik pengumpulan data seorang peneliti akan mendapatkan data yang valid untuk memenuhi standar data yang telah ditetapkan.⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi langsung ke lapangan, interview kepada subjek penelitian yakni kepala sekolah, bagian kurikulum, dan guru serta dokumentasi untuk mengumpulkan dokumen terkait dengan penelitian tersebut.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), H. 308.

Pada penelitian ini model analisis data yang digunakan adalah model Miles and Huberman, yakni dimulai dengan mereduksi data, penyajian data hingga verifikasi dan penyimpulan data.⁵ Adapun reduksi data yang dilakukan adalah dengan merangkum semua data yang diperoleh kemudian memilih hal pokok, kemudian fokus pada data yang berkaitan dengan fokus penelitian sedangkan data yang tidak diperlukan dapat dihilangkan. Selanjutnya adalah penyajian data yang digunakan adalah dengan menyajikan data dalam bentuk deskriptif naratif yang menyajikan data teks dan juga tabel. Setelah itu verifikasi dan penyimpulan data pada penelitian ini adalah menverifikasi data termasuk hasil interview kepada subjek penelitian dan menyimpulkan berdasarkan apa yang ada dalam rumusan masalah penelitian. Kesimpulan penelitian ini diharapkan aktivitas inseri nilai anti korupsi di sekolah tidak hanya pada aktivitas pembelajaran, namun nilai-nilai anti korupsi tercermin dari hidden curriculum yang dikembangkan oleh sekolah.

KAJIAN TEORI

Pendidikan anti korupsi menjadi perhatian khusus pemerintah guna menekan angka korupsi elit negara. Dengan adanya pendidikan antikorupsi mulai dari sekolah, maka pendidikan dasar harus mendukung upaya pemerintah tersebut. Berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Transparency International Corruption Index (TICPI) mencatat bahwa Indonesia menempati posisi paling buruk dalam kasus korupsi dengan Indeks Prestasi Korupsi (IPK) sebesar 2,4 dengan perhitungan mulai dari 1 sampai 10, artinya negara dengan IPK semakin besar, menunjukkan negara tersebut semakin bersih dari tindak korupsi.⁶

Berbagai media cetak dan elektronik hari ini tengah gempar membicarakan kasus-kasus korupsi dengan berbagai intrik yang ada di dalamnya. Kasus yang melibatkan pejabat negara yang mendapat keistimewaan perlakuan di dalam penjara atau diskon hukuman yang diberikan menjadi timpang bila dibandingkan dengan hukuman yang diberikan pada kasus ringan yang dilakukan oleh rakyat biasa. Hal ini menjadi kegelisahan kita semua sebagai rakyat Indonesia yang hidup pada zaman serba maju ini. Berbagai polemik mengenai korupsi memang menjadi pembahasan yang tidak

⁵ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Press, 2014), H. 40.

⁶ Agus Wibowo, *Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah (Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), H. 1.

kunjung usai, ini menandakan harus ada formula baru penanganan korupsi. Dalam dunia pendidikan langkah pemerintah melalui program KPK yakni menguatkan nilai-nilai dan sikap yang mencerminkan anti Korupsi sejak dini, supaya generasi muda paham bahaya laten korupsi.

Pendidikan anti korupsi menjadi tren baru yang diselenggarakan di pendidikan formal sekolah pada hari ini. Implementasi pendidikan anti korupsi sejak dini diharapkan menjadi salah satu pendorong terciptanya generasi muda yang melek anti korupsi dan bisa menjadi generasi yang lebih baik untuk kemajuan bangsa Indonesia. Dikutip dari website KPK mengenai pendidikan anti korupsi di sekolah dasar atau di Madrasah Ibtidaiyah menyebutkan bahwa pendidikan antikorupsi diawali dengan memastikan bahwa kurikulum mengakomodasi nilai-nilai antikorupsi. Sehubungan dengan ini, sebagai jantung pendidikan, kurikulum memiliki dua kekuatan, yaitu :

1. Pertama, Ketepatan memilih substansi atau lingkup pengetahuan yang akan dijabarkan. Kebenaran yang substansi tidak disangsikan, menjadi suatu hal yang penting dipelajari, benar-benar memberikan manfaat, relevan dengan kebutuhan siswa dalam kehidupannya, serta memancing bakat dan minat siswa untuk mempelajari sesuatu secara mandiri.
2. Kedua, pengelolaan kurikulum melalui pembelajaran aktif yang didukung oleh sistem penilaian yang mengarah pada pencapaian kompetensi dan terjadi keajaiban. Perencanaan kurikulum pembelajaran selanjutnya benar-benar dapat dijadikan acuan penyelenggaraan pembelajaran. Dalam perencanaan tentunya memperhatikan layak atau tidak kurikulum tersebut dirancang dan diimplementasikan di sekolah. Kurikulum juga harus mempertimbangkan bagaimana kemampuan siswa yang ada di sekolah tersebut, dapat menghadirkan pengalaman belajar sehingga tujuan pendidikan dapat tercapai.⁷

Dari kedua kekuatan diatas tersebut dapat menjamin ketercapaian tujuan pembelajaran, termasuk pada hal internalisasi nilai-nilai anti korupsi di sekolah. Nilai anti korupsi layaknya pendidikan karakter yang digaungkan terus menerus untuk diwujudkan dalam lembaga pendidikan khususnya lembaga formal. Pada dasarnya penanaman nilai anti korupsi di sekolah bukan lagi hal yang sulit karena intinya ada

⁷ KPK <aclc.kpk.go.id/media-kreatif-pendidikan-antikorupsi>.

pada penanaman sikap terpuji yang bisa dilakukan kepada semua subjek pendidikan. Jadi penanaman sikap anti korupsi ini juga tidak hanya pada siswa namun juga para *stake holder* penyelenggara pendidikan di sekolah tersebut.

Penguatan atau inseri nilai-nilai anti korupsi di sekolah menjadi salah satu program Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Indonesia. Langkah inseri disini adalah dengan menyisipkan pendidikan anti korupsi pada matapelajaran yang ada misalnya pada matapelajaran PPKn, bukan menambah matapelajaran baru. Adapun tahapan inseri dilakukan dalam tiga tahap yakni inisiatif merancang, sertakan peserta didik, dan siapkan jejaring. Dari ketiga tahapan ini diharapkan penguatan pendidikan anti korupsi di sekolah dapat terlaksana dengan baik dan membuahkan hasil yang maksimal.⁸

Salah satu sebab yang mendorong terjadinya suatu perubahan dalam pengelolaan pendidikan adalah melakukan pengembangan dan invosi kurikulum. Dalam hal ini kurikulum mengambil peran yang penting dan strategis selain untuk mengembangkan siswa kearah perkembangan yang maksimal baik secara jasmani dan rohaninya, kurikulum dapat menjadi tolak ukur untuk melihat kemajuan atau progres pendidikan sebuah negara. Pengembangan kurikulum ini juga harus berdasarkan dari evaluasi mendalam para ahli di bidang kurikulum tentunya. Untuk sampai pada pengembangan, maka seseorang atau lembaga harus memahami betul kurikulum yang dipakai pada saat itu. Tidak hanya kurikulum yang bersifat tertulis pada pembelajaran di kelas, namun aspek pendukung yang tidak tertulis juga penting diperhatikan oleh pengembang kurikulum.

Pemahaman mengenai kurikulum menjadi aspek penting dalam penyelenggaraan pendidikan formal. Kurikulum menjadi sentra kekuatan jalannya aktivitas pembelajaran di sekolah. Oleh karena itu guru dan tenaga kependidikan wajib sifatnya memahami kurikulum yang dipakai pada sekolah diaman mereka berada. Melalui kurikulum dapat kita ketahui bagaimana corak pembelajaran yang diterapkan, bagaimana jalannya aktivitas belajar yang dilakukan guru dalam kelas dan keseluruhan yang diadakan di sekolah tersebut.

⁸ Anas and dkk, h. 13.

Kurikulum yang demikian diatas sering disebut dengan *written curriculum* (kurikulum tertulis), artinya kurikulum yang memang didokumentasikan yang berasal dari Kementrian Pendidikan dan berlaku hampir disemua sekolah pada tingkatannya di Indonesia. Keberadaan kurikulum ini hendaknya memberikan kemudahan kepada penyelenggara pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tujuan pendidikan adalah tidak lain untuk memberikan kesejahteraan bagi bangsa dan negara. Melalui jendela pendidikanlah salah satu jalan bagi bangsa untuk memberikan kehidupan layak bagi orang yang hidup di dalamnya. Pelaksanaan pendidikan seumur hidup yang dialami oleh manusia menjadi dorongan yang kuat mewujudkan kehidupan yang selalu progresif dari hari ke hari.

Kurikulum secara bahasa berasal dari bahasa Yunani yakni *curir* dan *curere* yang mempunyai arti tempat barpacu, berlari, dan sebuah perlombaan yang telah mempunyai rute untuk dilalui oleh para kompetitor perlombaan tersebut. Dengan kata lain, rute tersebut mau tidak mau harus dipatuhi oleh para kompetitor dengan berbagai konsekuensinya. Dalam dunia pendidikan, banyak sekali definisi kurikulum yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya adalah definisi dari Ronald C. Doll bahwa kurikulum sekolah adalah muatan proses, baik formal maupun informal yang diperuntukkan bagi pelajar untuk memperoleh pengetahuan dan pemahaman, mengembangkan keahlian dan mengubah apresiasi sikap dan nilai dengan bantuan sekolah.⁹

Aktivitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah tidak lepas dari adanya kurikulum karena menjadi lembaga formal penyedia layanan pendidikan. Aturan pemerintah mengenai kurikulum yang selalu diramu dari tahun ke tahun sampai pada hari ini membuktikan bahwa perubahan pola pembelajaran terletak pada perubahan kurikulum yang digunakan di Indonesia. Dari kurikulum inilah pedoman pembelajaran di sekolah lahir dan dilaksanakan. Artinya kurikulum memang menjadi hal penting dan harus diperhatikan dan dipahami oleh stake holder penyelenggara pendidikan di Indonesia. Sebelumnya sudah harus kita pahami bersama bahwa kurikulum dalam

⁹ Ali Mudlofir, *Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dan Bahan Ajar Dalam Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), h. 1-2.

pendidikan memunculkan beberapa istilah turunan, misalnya kurikulum potensial, kurikulum aktual dan kurikulum tersembunyi.¹⁰

Adapun yang dimaksud dengan kurikulum potensial atau sering disebut kurikulum ideal adalah bentuk rencana atau program tertulis (*written curriculum*) mengenai pedoman pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Menjadi hal penting seorang guru memahami dan melaksanakan aktivitas pembelajaran di sekolah berpegang pada kurikulum yang dipakai pada saat itu. Selanjutnya kurikulum ideal adalah realisasi kurikulum pada sebuah sekolah, artinya kurikulum yang berlaku secara riil yang dapat diterapkan oleh sekolah itulah yang disebut kurikulum ideal. Hal ini dikarenakan banyak faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kurikulum di sekolah, oleh karena itu sebagian sekolah biasanya tidak mampu menerapkan secara sempurna kurikulum yang berlaku pada saat itu, bergantung pada keadaan dan juga kinerja dari stake holder yang ada di sekolah tersebut. Yang ketiga adalah kurikulum tersembunyi (*hidden curriculum*) adalah suatu kegiatan atau aktivitas yang dapat mempengaruhi perkembangan siswa namun tidak diprogramkan dalam kurikulum potensial dan kurikulum ideal. Bentuk kurikulum tersembunyi ini biasanya berupa budaya positif yang terpelihara sejak lama di sekolah tersebut.¹¹

Mendengar istilah kurikulum tersembunyi memang masih jarang atau asing didengar, keberadaan kurikulum tersembunyi menjadi pelengkap atau pendukung bagi kurikulum tertulis. Istilah *hidden curriculum* diperkenalkan oleh Philip W. Jackson melalui bukunya yakni *Life in Classrooms*, dalam buku tersebut Jackson secara kritis mencari jawaban atau alasan utama yang dapat membentuk habits budaya siswa seperti kepercayaan, sikap dan pandangan siswa. Selanjutnya Jackson menjelaskan bahwa *hidden curriculum* ini sebagai aturan sosial dan perilaku yang diharapkan oleh lingkungan namun tidak tertulis. Dengan kata lain ia mengemukakan bahwa pendidikan adalah sebagai proses sosialisasi.¹²

Hidden curriculum didefinisikan oleh Subandijah dalam bukunya yakni berbagai hal yang dapat mempengaruhi pembelajaran dan pendidikan di sebuah sekolah, *hidden curriculum* ini mempunyai dua kemungkinan yakni dapat menjadi

¹⁰ Sukiman, *Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 4.

¹¹ Sukiman, h. 8.

¹² Rakhmat Hidayat, *Pengantar Sosiologi Kurikulum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), h. 74.

faktor pendukung dan juga bisa menjadi faktor penghambat pendidikan di sekolah.¹³ Selain itu, *hidden curriculum* juga dapat digunakan sebagai kontrol sosial perilaku guru dan juga siswa. Dengan adanya *hidden curriculum* juga memberikan pengalaman yang mendalam kepada siswa dalam hal kepribadian, nilai dan norma yang tidak dimuat dalam kurikulum tertulis. Secara tidak langsung *hidden curriculum* ini juga akan meningkatkan motivasi belajar siswa. Oleh karena itulah keberadaan *hidden curriculum* ini penting untuk mencapai tujuan pendidikan. Desain pengembangan *hidden curriculum* yang matang akan membantu tercapainya tujuan pendidikan yang sudah dirumuskan dalam visi dan misi sekolah.

Pendapat Dede Rosyada menyebutkan bahwa *hidden curriculum* adalah segala bentuk kegiatan yang dapat mempengaruhi siswa, baik yang berhubungan dengan lingkungan sekolah, suasana kelas, pola interaksi guru dengan siswa di dalam kelas, bahkan pada kebijakan serta manajemen pengelolaan sekolah. Sebagai contoh dalam hal kebijakan yakni bagaimana sekolah menerapkan kebiasaan atau berbagai aturan disiplin yang harus diterapkan oleh seluruh komponen sekolah atau warga sekolah. Diantara kebiasaan tersebut misalnya ketepatan guru saat pelajaran, kemampuan guru menguasai kelas, bagaimana guru menyikapi berbagai pola kenakalan siswa baik diluar maupun di dalam kelas. Hal ini menjadi sebuah runtutan kegiatan yang secara tidak langsung mempengaruhi pendidikan yang diselenggarakan di sebuah sekolah. Oleh karena itulah kehadiran *hidden curriculum* tidak lain untuk melengkapi adanya kurikulum tertulis yang menunjang proses pendidikan di sebuah sekolah.

Jeane H. Balantine mengatakan bahwa *hidden curriculum* terbentuk dari tiga R yang sangat penting untuk dikembangkan, yaitu :

- a. *Rules* atau aturan, sekolah harus menciptakan berbagai aturan untuk menciptakan situasi dan kondisi sekolah yang kondusif untuk belajar.
- b. *Regulations* atau kebijakan, sekolah harus membuat kebijakan yang mendukung terhadap tercapainya tujuan dari pembelajaran di sekolah tersebut, kebijakan tersebut tidak hanya bersangkutan terhadap siswa tetapi perlu dibuat kebijakan untuk semua komponen sekolah, tentunya dengan formulasi yang berbeda.

¹³ Subandijah, *Pengembangan Dan Inovasi Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), h. 25.

- c. *Routines* atau kontinyu, sekolah harus menerapkan segala kebijakan dan aturan secara terus menerus dan adaptif, tujuannya agar kebijakan tersebut dapat diterima dengan baik dan terus dilaksanakan¹⁴

Dari definisi diatas, maka *hidden curriculum* yang ada menjadi sebuah budaya yang dilakukan secara berkelanjutan. Dalam hal ini budaya positif tentunya yang harus dilakukan secara kontinyu untuk mencapai tujuan pendidikan atau pembelajaran di sekolah. Langkah inseri menjadi salah satu wujud pengembangan pendidikan anti korupsi yang dilakukan di MIN 1 Banyumas. Menyisipkan sikap-sikap yang menunjang pelaksanaan pendidikan anti korupsi disekolah tersebut melalui berbagai kegiatan diluar kegiatan formal pembelajaran. Penguatan nilai-nilai anti korupsi yang dilakukan adalah dengan pengautan sikap disiplin, tanggung jawab dan kerjasama yang selalu dilakukan oleh semua warga sekolah di MIN 1 Banyumas.

Pengembangan kurikulum merupakan rangkaian proses perencanaan kurikulum agar dapat menghasilkan rancangan kurikulum yang luas dan spesifik. Dalam proses ini erat kaitannya dengan seleksi dan pengorganisasian berbagai komponen pembelajaran, diantaranya adalah penetapan jadwal pengorganisasian kurikulum dan spesifikasi tujuan yang disarankan, matapelajaran, kegiatan, sumber dan alat pengukur pengembangan kurikulum yang mengacu pada kreasi sumber-sumber unit, dan garis besar kurikulum untuk memudahkan pembelajaran.¹⁵

Pada dasarnya pengembangan kurikulum adalah mengarahkan kurikulum yang dipakai sekarang pada pencapaian tujuan pendidikan yang diharapkan karena adanya penaruh yang sifatnya positif baik yang berasal dari dalam maupun dari luar, dengan harapan siswa dapat menghadapi masa depannya yang lebih baik. Di era pembangunan yang semakin maju ini, pengembangan kurikulum diharuskan memperlihatkan *link and match* antara *out put* dengan lapangan kerja yang diperlukan. Siswa yang lulus harus disiapkan untuk memenuhi lapangan kerja dan harus memenuhi tuntutan kriteria pekerjaan yang diharapkan.¹⁶

¹⁴ Widya Rahmawati, ‘Pengembangan Hidden Curriculum Yang Menunjang Pendidikan Anti Korupsi Di MIN 1 Banyumas’, 2018, h. 30-3.

¹⁵ Oemar Hamalik, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), h. 183.

¹⁶ Dakir (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h. 91-92.

Pengembangan kurikulum melibatkan banyak stakeholder yang berperan didalamnya, diantaranya administrator pendidikan, ahli pendidikan, ahli hukum, ahli kurikulum, ahli bidang ilmu pengetahuan, guru-guru, dan orangtua murid serta tokoh masyarakat. Namun dari pihak-pihak yang terlibat, administratorlah yang secara terus menerus terlibat aktif dalam pengembangan kurikulum, karena akan terjadi sinkronisasi data yang harus selalu di upgrade.¹⁷ Tidak kalah penting yakni guru dan orangtua siswa, mereka adalah dua hal yang sebenarnya mempunyai tugas yang hampir mirip karena guru adalah orangtua siswa ketika di sekolah sementara orangtua mereka di rumah adalah bapak dan ibu yang merawat mereka di rumah.

Pengembangan kurikulum dalam penelitian ini adalah proses penyusunan kurikulum oleh tim pengembang kurikulum (*curriculum developer*) dan kegiatan tersebut bertujuan untuk menghasilkan kurikulum yang menjadi acuan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Dalam pengembangan kurikulum terdapat beberapa model dilihat dari keluasan pengembangannya maupun dari tahapan pendekatannya diantaranya adalah :

1. Berdasarkan Proses pengajaran

- a. *The subject Design* : Pada kurikulum ini matapelajaran disajikan terpisah atau berdiri sendiri. Model ini merupakan model yang dikembangkan sejak zaman Yunani. Mereka mengembangkan Trivium (gramatika, logika, dan retorika) dan Quadrium (matematika, geometri, astronomi, dan musik)
- b. *The Disiplines Design* : Pada model ini yang dikembangkan adalah disiplin ilmu fisika, biologi, psikologi, sosiologi dan sebagainya. Pada pengembangan kurikulum model ini siswa akan lebih banyak diarahkan pada memahami dan menemukan sesuatu dalam pembelajarannya.
- c. *The Broad Fields Design* : Pengembangan kurikulum dengan model ini mempunyai tujuan untuk menyiapkan siswa agar siap hidup dalam dunia informasi yang spesialis, dengan mempunyai pemahaman yang menyeluruh. Pengembangan ini biasa di gunakan pada SMP dan SMA.

2. Berdasarkan Pengelolaan Kurikulum

¹⁷ Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013), h. 155.

- a. Model Administratif : Pengembangan kurikulum dengan model ini paling banyak dikenal dan diterapkan. Sesuai dengan namanya pengembangan kurikulum model ini diinisiasi oleh pada administrator pendidikan dan menggunakan tahapan secara administrasi.
 - b. Model dari Bawah (*grass-roots*) : Model pengembangan kurikulum ini adalah model yang upaya pengembangannya muncul dari guru-guru yang ada di sekolah. Grass-roots ini menggunakan konsep desentralisasi bukan sentralisasi. Subjek pengembang kurikulum adalah sebagian atau keseluruhan guru yang ada di sebuah sekolah. Hal ini dikarenakan guru adalah perencana, pelaksana dan penyempurna dari aktivitas pembelajaran di kelas.
3. Berdasarkan Implementasi Kurikulum
- a. *The Concerns Based Adaptation Model* (CBAM) : Pada model ini pengembangan kurikulum menitik beratkan pada tingkat perhatian atau kepedulian guru tentang suatu inovasi dan bagaimana guru menggunakan hasil inovasi tersebut dalam pembelajaran di kelas.
 - b. TORI model: Model pengembangan kurikulum dengan fokus utama pada perubahan personal atau pribadi dan perubahan sosial.
 - c. *The Profile Inovation Model* : Model ini menawarkan pengembangan kurikulum dengan mengembangkan suatu gambaran (profile), hambatan-hambatan dalam melakukan perubahan, serta upaya mengatasi hambatan tersebut. Pada model ini memberikan strategi kepada guru untuk mengatasi hambatan pada proses implementasi kurikulum.¹⁸

Pengembangan *hidden curriculum* pada dasarnya sama dengan pengembangan kurikulum aktual, hanya saja pada *hidden curriculum* menekankan pada aktivitas diluar pembelajaran di kelas. Pada penelitian ini inseri nilai-nilai anti korupsi dilakukan pada aktivitas yang dilakukan siswa, guru dan warga sekolah pada kebiasaan atau budaya sekolah, namun tidak mengesampingkan inseri nilai anti korupsi pada saat guru melakukan pembelajaran, misalnya pada matapelajaran yang disampaikan di kelas.

¹⁸ Ba deriah, *Buku Ajar Pengembangan Kurikulum*, (Palopo: Lembaga Penerbitan Kampus IAIN Palopo, 2019), h. 70-77.

Pengembangan hidden curriculum yang dilakukan di MIN 1 Banyumas lebih menekankan bagaimana sikap disiplin, tanggungjawab dan kerjasama dapat disisipkan dalam aktivitas di sekolah tersebut. Model yang digunakan dalam pengembangan hidden curriculum di MIN 1 Banyumas menganut model *Grass-Roots* yang mana ide-ide pengembangan memang datang dari para guru yang ada di sekolah tersebut. Selain memelihara budaya positif yang sudah ada di sekolah, mereka memberikan sentuhan inovasi pada aspek hidden curriculum yang tertuang pada beberapa kegiatan diluar pembelajaran di kelas.

Langkah inseri ini tidak berhenti pada penerapan saja namun sampai pada tahap evaluasi penerapan pendidikan antikorupsi di sekolah. Evaluasi berasal dari bahasa Inggris yakni *evaluation* yang artinya penilaian. Evaluasi merupakan langkah penilaian untuk mengambil keputusan yang menggunakan seperangkat hasil pengukuran dengan melihat pada tujuan yang telah dirumuskan. Sedangkan evaluasi dalam pendidikan merupakan proses untuk menentukan tujuan pendidikan dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan atau dengan kata lain evaluasi pendidikan merupakan kegiatan penilaian di dunia pendidikan.¹⁹

Langkah evaluasi pendidikan antikorupsi melalui pengembangan hidden curriculum dilakukan melalui evaluasi afektif pada siswa. Evaluasi efektif berkaitan dengan moral atau sikap siswa. Penilaian kompetensi sikap dalam pembelajaran merupakan serangkaian kegiatan yang dirancang untuk mengukur sikap peserta didik sebagai hasil dari suatu program pembelajaran. Penilaian sikap juga merupakan aplikasi suatu standar atau sistem pengambilan keputusan terhadap sikap. Kegunaan utama penilaian sikap sebagai bagian dari pembelajaran adalah refleksi (cerminan) pemahaman dan kemajuan sikap peserta didik secara individual.²⁰ Dalam Inseri nilai-nilai pendidikan antikorupsi melalui hidden curriculum ini merupakan penguatan sikap jujur, disiplin, bertanggung jawab dan kerjasama. Oleh karena itulah bentuk evaluasinya adalah evaluasi kompetensi sikap siswa.

¹⁹ I Nyoman Doni Prmana and dkk, *Evaluasi Pendidikan* (Palangakaya: Beta, 2015), h. 1.

²⁰ ‘Panduan Penilaian Kompetensi Sikap 2013’, 2021

<Pengawasmadrasah.files.wordpress.com/2013/11/7-panduan-penilaian-kompetensi-sikap-2013.pdf>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nilai-nilai pendidikan anti korupsi disekolah menjadi upaya yang dilakukan pemerintah guna mencetak generasi yang melek anti korupsi sejak dini. Dari upaya yang dilakukan melalui lembaga pendidikan formal diharapkan mampu memberikan dampak yang signifikan untuk masa yang akan datang. Siswa yang ada di sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah hari ini akan menjadi figur-figur dimasa depan kelak menggantikan figur yang sekarang ada. Bisa dibayangkan beribu siswa yang ada di Indonesia yang telah mendapatkan pengetahuan dan dapat mengaplikasikan nilai anti korupsi ketika mereka menjadi figur, maka tujuan pendidikan akan benar-benar tercapai. Maraknya berita mengenai tindakan korupsi yang dilakukan oleh oknum bahkan terjadi dimasa pandemi covid-19 menjadi kepriatinan yang mendalam bagi kita rakyat Indonesia. Oleh karena itulah penguatan (inseri) nilai-nilai anti korupsi di sekolah menjadi penting diperhatikan.

Adapun berkaitan dengan *hidden curriculum* Subandijah menyebutkan bahwa *hidden curriculum* ini adalah semua hal mempunyai pengaruh dalam pencapaian tujuan pendidikan. *Hidden curriculum* adalah budaya/norma positif yang terpelihara dan tidak dituliskan dalam kurikulum aktual, namun keberadaannya berpengaruh terhadap kondisi sebuah sekolah. Dalam penelitian ini *hidden curriculum* berpengaruh terhadap pembentukan moral guru, tenaga kependidikan dan juga siswa sekolah. Dalam rangka pengautan sikap antikorupsi *hidden curriculum* yang dimaksud adalah kegiatan diluar kelas. Artinya ini sejalan dengan penguatan nilai anti korupsi yang dilaksanakan di MIN 1 Banyumas melalui penguatan sikap disiplin, tanggung jawab dan kerjasama oleh seluruh warga sekolah.

Kemudian mengenai pendidikan anti korupsi, Agus Wibowo dalam bukunya menyebutkan bahwa pendidikan anti korupsi menjadi sebuah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pembelajaran yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi di sekolah. Dalam proses tersebut, maka pendidikan anti korupsi tidak hanya sekedar menjadi media bagi transfer pengetahuan, namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan terhadap penyimpangan perilaku korupsi. Hal ini dilakukan tidak hanya pada saat menerangkan

matapelajaran di kelas, namun juga menjadi salah satu budaya yang dijaga keberlangsungannya di MIN 1 Banyumas.

Hasil penelitian terhadap Inseri pendidikan antikorupsi melalui pengembangan *hidden curriculum* di MIN 1 Banyumas dilaksanakan berdasarkan pedoman yang di buat oleh KPK. Inseri disini mengandung pengertian bahwa pendidikan antikorupsi ini tidak membuat satu matapelajaran baru tersendiri, namun masuk pada matapelajaran yang ada di sekolah seperti PPKn. Namun tidak cukup hanya pada pembelajaran di kelas saja, di MIN 1 Banyumas terdapat beberapa hasil pengembangan *hidden curriculum* yang mendukung inseri pendidikan antikorupsi. Dalam penelitian yang dilakukan penulis dengan terjun langsung ke lapangan mengidentifikasi beberapa kegiatan diluar pembelajaran yang menunjang inseri pendidikan antikorupsi di MIN 1 Banyumas yakni, lomba kebersihan, pengadaan buku pengembangan diri, dan Pin antikorupsi.

Penyisipan sikap jujur, disiplin, tanggungjawab dan kerjasama melalui lomba kebersihan kelas memang sesuatu yang wajar dilakukan. Di MIN 1 Banyumas punya cara yang unik, yakni lomba kebersihan dilakukan dengan menjaga kebersihan kelas masing-masing dan menerapkan Amsali (Ambil Sampah Lima)²¹. Dari kebiasaan menerapkan amsali ini secara tidka langsung sikap jujur, disiplin dan bertanggungjawab dapat diterapkan secara kontinyu.

Lomba kebersihan ini diikuti oleh siswa yang duduk dikelas tiga sampai dengan kelas enam. Mekanismenya yang dipakai adalah dengan menilai secara mendadak tanpa diketahui oleh siswa mengenai keadaan kelas dan kebersihannya. Dengan nilai yang diakumulasi selama kurnag lebih satu bulan, maka diakhir bulan nanti akan diadakan pengumuman dan pemberian reward untuk kelas yang paling bersih. Reward disini bukan dalam bentuk hadiah atau uang namun berupa bendera dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Bendera Merah : Kelas Kotor
- b. Bendera Kuning : Kelas Bersih

²¹Amsali a tau akronim dari Ambil Sampah Lima merupakan gerakan memungut sampah masing-masing siswa minima lima sampah di skeitar sekolah. Sampah ini kemudian dibuang ke tempat sampah yang ada di sekolah. Kegiatan ini bertujuan untuk melatih kemandirian dan kesadaran siswa terhadap kebersihan lingkungan sekitarnya. Harapannya kedepan siswa terbiasa untuk memungut sampah dimanapun mereka melihat sampah kemudian membuangnya ke tempat sampah.

c. Bendera Hijau : Kelas Paling bersih

Penyerahan bendera ini dilakukan pada saat upacara bendera hari senin disaksikan oleh semua warga sekolah di MIN 1 Banyumas. Bagi kelas yang mendapatkan bendera merah diharapkan dapat meningkatkan kedisiplinan dan kerjasamanya untuk menjaga kebersihan kelasnya bersama-sama. Sedangkan kelas yang mendapat bendera hijau harus dapat mempertahankan kebersihannya. Pada kegiatan ini selain untuk mendapatkan reward, tetapi untuk membeiasakan siswa untuk hidup sehat dan bersih.

Selanjutnya pengadaan buku pengembangan diri, buku ini berfungsi sebagai monitor aktivitas siswa diluar kelas. Buku pegembangan diri di MIN 1 Banyumas sebanarnya sudah lama diadakan dan sudah melalui beberapa kali revisi untuk penyempurnaan konten isinya. Buku pengembangan diri ini kurang lebih berisi tentang doa-doa belajar, pencatatan kegiatan siswa, prestasi siswa dan juga kolom komunikasi guru dengan wali siswa. Buku pengembangan diri ini dicetak satukali dalam satu tahun dan dapat dipakai selama dua semester. Diantara pencatatan kegiatan yang ada dalam buku tersebut adalah perkembangan kemampuan BTA (Baca Tulis Al-Qur'an) dan Amaliyah bulan Islam. Jadi dalam buku pengembangan diri guru dikelas selanjutnya dapat mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dalam menguasai BTA atau hafalan surat pendek pilihannya sudah sampai mana dan sebagainya. Kemudian mengenai kolom prestasi, siswa yang mengikuti perlombaan diluar sekolah dan memperoleh kejuaraan juga harus dicatat di dalam buku pengembangan diri ini. Dan pada kolom komunikasi guru dengan orangtua disana dapat berisi tentang laporan orang tua tentang perkembangan aktivitas dan kemampuan siswa di rumah, undangan dari guru kepada wali siswa dan juga saran serta kritik wali siswa kepada guru.

Pemberian Pin Antikorupsi kepada siswa yang dalam penilaian sikap mumpuni dalam penerapan sikap antikorupsi (Jujur, disiplin, bertanggungjawab dan kerjasama). Pin yang diberikan bertuliskan “Berani Jujur Hebat!”. Pemberian pin ini bertujuan untuk memberikan apresiasi kepada siswa yang berhasil merubah sikap dan menerapkan sikap antikoprupsi di sekolah dan kehidupan sehari-hari. Penilaian dilakukan guru dan juga orangtua melalui pengamatan sikap dirumah yang ditulis dalam buku pengembangan diri siswa. Pemberian pin kepada siswa juga memberikan

motivasi dan semangat siswa yang memakainya, sekolah mentargetkan semua siswa akan mengenakan pin antikorupsi sebagai wujud penguatan sikap antikorupsi berhasil diterapkan di MIN 1 Banyumas. Selain pin antikorupsi pemasangan benner bertuliskan pendidikan antikorupsi juga terpampang di titik strategis di sekolah. Dalam rangka menguatkan literasi pendidikan antikorupsi di perpustakaan MIN 1 Banyumas juga menyediakan buku-buku yang mengandung unsur pendidikan antikorupsi.

Selain kepada siswa inseri sikap antikorupsi juga menyasar pada guru dan tenaga kependidikan di MIN 1 Banyumas. Diantara langkah insersinya terlihat pada kode etik guru dan tenaga kependidikan MIN 1 Banyumas yakni :

- a. Mempunyai tugas menjadikan siswa yang beriman, bertaqwa, kokoh, berakhlakul karimah, berbudaya Islami dan madani berilmu pengetahuan, berwawasan luas, berkerampilan tinggi dan unggul serta berjiwa mandiri
- b. Guru mengisi daftar hadir setiap mengajar pada saat mengajar kurikuler, kokurikuler dan ekstrakurikuler
- c. Guru harus Tepat waktu/tidak terlambat dalam melaksanakan pembelajaran di kelas maupun kegiatan diluar kelas
- d. Pendidik dan tenaga kependidikan dilarang menerima sesuatu yang berbau gratifikasi atau sejenisnya dengan alasan apapun
- e. Aktif dan disiplin menghadiri rapat dan acara-acara lain yang ditetapkan dengan tepat waktu.

Semua kegiatan inseri pendidikan antikorupsi ini dimonitor oleh kepala sekolah yang akan disampaikan sekurang-kurangnya satu bulan sekali dalam rapat rutin guru di MIN 1 Banyumas. Berdasarkan hasil interview dengan bidang kurikulum MIN 1 Banyumas, sekolah selalu berusaha lebih baik dan lebih baik lagi. Tidak hanya pada aspek pembelajaran, namun juga memlihara budaya antikorupsi yang sudah terbangun di MIN 1 Banyumas sebagai budaya positif yang akan selalu ditingkatkan lagi. Setiap kritik dan saran dari seluruh guru dan membaca saran dari orang tua siswa menjadi pedoman untuk perbaikan kearah yang lebih baik lagi. Menyadari bahwa penguatan pendidikan antikorupsi ini erat sekali dengan pembentukan karakter siswa, dimana hal tersebut tidak bisa dilakukan secara instan namun memerlukan waktu yang panjang. Oleh karena itu sumbangsih pemikiran dan dukungan dari berbagai pihak sangat

dibutuhkan untuk mewujudkan tujuan pendidikan di MIN 1 Banyumas khususnya dan di Indonesia pada umumnya.

Dalam langkah inseri pendidikan anti korupsi ini juga harus melalui tahap evaluasi yang mana tahap evaluasi akan membawa pada perubahan yang lebih baik untuk kedepannya. Cara evaluasi pendidikan antikorupsi sama dengan evaluasi objektif yang dilakukan oleh guru kepada siswa, misalnya pada aspek kehadiran siswa, sikap antikorupsi yang diterapkan selama berada di sekolah dan di rumah. Evaluasi yang dilakukan pada setiap individu pada dasarnya akan mempengaruhi kinerja komunitas. Transformasi sikap antikorupsi ini bukan hanya sebuah prestasi individu siswa saja namun juga sebuah prestasi bagi sekolah secara keseluruhan. Sudut pandang evaluasi pendidikan antikorupsi sifatnya kuratif-negatif, artinya pendidikan antikorupsi dikatakan berjalan apabila berkurangnya perilaku buruk yang terjadi di dalam sekolah. Misalnya berkurangnya siswa yang tidak jujur, berkurangnya siswa yang tidak bertanggungjawab, tidak disiplin dan tidak mau bekerjasama dengan temannya dalam hal-hal positif.

Evaluasi dengan mekanisme diatas sebenarnya merupakan langkah awal, karena inseri dalam prosesnya menuju penghayatan sikap atau nilai bukan semata-mata memiliki unsur kuratif saja melainkan juga secara positif seperti meningkatkan kreativitas siswa secara keseluruhan. Jika di sekolah tidak lagi terdapat masalah tentang perilaku siswanya, maka yang digunakan untuk menilai keberhasilan pendidikan adalah dengan kreativitas, yaitu inisiatif yang akan tampil secara keseluruhan performa yang dimiliki sekolah yang biasa disebut prestasi. Sekolah yang berprestasi pastinya mampu mengatasi persoalan seputar perilaku dan semakin mengarahkan diri siswa kepada hal positif yang semakin menyempurnakan kinerja pendidikan.

KESIMPULAN

Dari pemaparan diatas, peneliti menyimpulkan inseri atau penguatan sikap antikorupsi melalui pengembangan hidden curriculum di MIN 1 Banyumas secara garis besar adalah sebagai berikut :*Pertama*, sikap anti korupsi yang dikembangkan adalah jujur, disiplin, bertanggung jawab dan bekerjasama dalam hal positif. Bentuk pengembangannya adalah dengan mengadakan lomba kebersihan antar kelas mulai dari kelas 3 sampai dengan kelas 6. Pemberian reward berupa bendera Merah, Kuning atau

Hijau kepada kelas yang masing-masing mempunyai kriteria Merah untuk Kelas kotor, Kuning untuk kelas bersih dan Hijau untuk kelas paling bersih. Pemberian reward ini bertepatan dengan kegiatan upacara bendera pada ahari senin di akhir bulan. Upaya ini dilakukan untuk melihat bagaimana kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab dan kerjasama yang terbangun di kelas tersebut untuk menjaga kebersihan kelasnya masing-masing serta membiasakan siswa untuk hidup bersih dan sehat.

Kedua, inseri sikap *antikorupsi* di MIN 1 Banyumas menyasar pada semua warga sekolah tidak hanya siswa saja. Dalam hal ini diwujudkan melalui kegiatan yang sudah dirancang oleh guru dan kepala sekolah, namun kegiatan ini diluar kegiatan pembelajaran di kelas. Hidden curriculum disini diharapkan menjadi ruh penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Jadi dalam rangka mensukseskan penguatan sikap antikorupsi ini memerlukan sinergi semua pihak yang ada di sekolah. Hidden curriculum diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi semua warga sekolah dan juga mencapai tujuan pendidikan di MIN 1 Banyumas.

Ketiga, model pengembangan hidden curriculum yang digunakan di MIN 1 Banyumas dalam rangka penguatan sikap antikorupsi adalah model *grass-roots*, dimana ide atau gagasan muncul dari pemikiran para guru dengan tujuan mensukseskan inseri nilai-nilai antikorupsi di sekolah. Hal ini seiring dengan ditunjuknya MIN 1 Banyumas sebagai salah satu sekolah percontohan dari KPK untuk melaksanakan inseri pendidikan antikorupsi di sekolah dasar. Upaya yang dilakukan oleh sekolah tidak lain untuk menyambut baik program pemerintah guna menyiapkan generasi emas bebas korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, Zaulkifli, and dkk, *Inseri Pendidikan Antikorupsi Melalui Mata Pelajaran PPKn Untuk Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah*, 2018
- Baderiah, *Buku Ajar Pengembangan Kurikulum*, (Palopo: Lembaga Penerbitan Kampus IAIN Palopo, 2019)
- Dakir (Jakarta: Rineka Cipta, 2010)
- Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: rajawali Press, 2014)
- Hamalik, Oemar, *Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013)

- Hidayat, Rakhmat, *Pengantar Sosiologi Kurikulum* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011)
- Kompas, Diakses pada Agustus 2021 <kompas.com/read/2021/04/09/18483491/icw-sepanjang-2020-ada-1298-terdakwa-kasus-korupsi-kerugian-negara-rp-567>
- KPK <aclc.kpk.go.id/media-kreatif-pendidikan-antikorupsi>
- Manurung, Rosida Tiurma, ‘Pendidikan Antikorupsi Sebagai Satuan Pembelajaran Berkarakter Dan Humanistik’’, *Sosioteknologi*, 27, no 11 (2012), 232
- Mudlofir, Ali, *Aplikasi Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Dan Bahan Ajar Dalam Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012)
- ‘Panduan Penilaian Kompetensi Sikap 2013’, 2021 <Pengawasmadrasah.files.wordpress.com/2013/11/7-panduan-penilaian-kompetensi-sikap-2013.pdf>
- Prmana, I Nyoman Doni, and dkk, *Evaluasi Pendidikan* (Palangakaya: Beta, 2015)
- Rahmawati, Widya, ‘Pengembangan Hidden Curriculum Yang Menunjang Pendidikan Anti Korupsi Di MIN 1 Banyumas’, 2018
- Subandijah, *Pengembangan Dan Inovasi Kurikulum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009)
- Sukiman, *Pengembangan Kurikulum Perguruan Tinggi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015)
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Pengembangan Kurikulum Teori Dan Praktek* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2013)
- Wibowo, Agus, , *Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah (Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi Di Sekolah)* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013)